



Informasi Strategis

Senin, 18 Januari 2021

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14**

Kembali Pecahkan Rekor, Kasus Terkonfirmasi Akibat Covid-19 Bertambah 14.224 Kasus

1

FAKTA

Pada tanggal 16 Januari 2021, sesuai data Satgas Penanganan Covid-19 dilaporkan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia bertambah 14.224 kasus, sehingga jumlah kasus saat ini mencapai 896.642 kasus, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Sedangkan jumlah kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia bertambah 283 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga kasus kematian akibat Covid-19 telah mencapai 25.767 orang.

TINGKAT KERAWANAN KABUPATEN/KOTA



TINGKAT KERAWANAN PROVINSI



TINGKAT KERAWANAN NASIONAL



2

ANALISIS

Laju pertambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 terus meningkat dan berfluktuasi di atas angka 10.000 sehari bahkan kembali memecahkan rekor bertambah 14.224 dalam sehari. Laju pertambahan kasus terkonfirmasi terutama dipengaruhi oleh banyaknya jumlah sampel yang diperiksa dalam 24 jam terakhir. Sementara laju pertambahan kasus kematian akibat Covid-19 berfluktuasi di atas 200 s.d. 300 kasus/hari, bahkan telah memecahkan rekor dengan 306 kasus dalam sehari pada tanggal 13 Januari 2021.

3

DAMPAK

Akibat laju pertambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 yang masih tinggi bahkan meningkat, ditambah dengan banyak terinfeksi tenaga medis, pelayanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit semakin terbebani.

4

SARAN

Seluruh Satker perlu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, penyemprotan disinfektan di ruangan-ruangan secara rutin, menerapkan WFO/WFH secara efektif, menerapkan isolasi mandiri bagi personel penderita Covid-19, serta mendorong pemeriksaan kesehatan personelnnya.

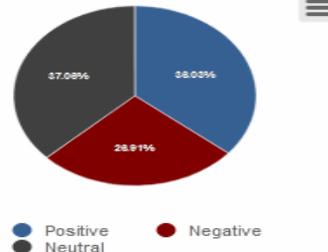
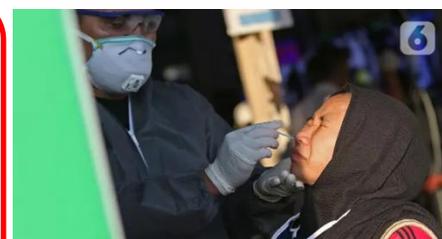
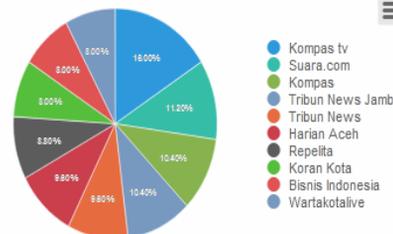
Kemhan mendukung program vaksinasi yang dilakukan Kemenkes dan Satgas Covid-19 serta mendorong TNI/Polri untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di daerah.

MEDIA EXPOSURE

875 Berita Online

175.177 Cuitan Twitter

10 Posting Facebook



KAWASAN AMERIKA, EROPA, DAN AFRIKA

1 FAKTA/DATA Rusia keluar dari Traktat *Open Skies*

Pada tanggal 15 Januari 2021 Pemerintah Rusia menyatakan akan mengikuti langkah AS keluar dari Traktat *Open Skies*. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa sejak keluarnya AS dari *Open Skies* pada tahun 2020, Rusia telah berusaha untuk mempertahankan traktat tersebut namun tidak mendapatkan respon positif dari negara-negara sekutu AS. Traktat *Open Skies* merupakan perjanjian yang bertujuan untuk membangun kepercayaan antara Rusia dan Negara-negara Barat yang mengizinkan penerbangan intai di atas wilayah negara penandatanganan satu sama lain untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan aktivitas militer.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



2

ANALISA

1. Keluarnya Rusia dari *Open Skies* menjadi penanda baru bagi ketegangan antara Rusia dengan AS dan Negara-negara Barat. Sebelumnya pada tahun 2019 Rusia dan AS telah mundur secara resmi dari Traktat *Intermediate Nuclear Forces* (INF) yang membatasi kepemilikan senjata nuklir jenis tertentu. Dengan mundurnya Rusia dari *Open Skies*, maka Rusia dan AS hanya tinggal memiliki perjanjian *Strategic Arms Reduction Treaty* (START) yang juga akan segera berakhir masa berlakunya.
2. Perbedaan pendapat antara dua negara penandatanganan utama *Open Skies* yang mengerucut kepada keluarnya Rusia dan AS ini di satu sisi merupakan dampak dari pendekatan kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump. Belum dapat dipastikan apakah Presiden AS yang baru Joe Biden akan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mempertahankan atau memperbaharui sejumlah perjanjian dengan Rusia tersebut.

3

DAMPAK

Semakin sedikitnya mekanisme resmi untuk mereduksi ketegangan antara Rusia dengan AS dan Negara-negara Barat berpotensi mendorong masing-masing pihak untuk bertindak secara unilateral yang ke depan dapat meningkatkan ketegangan di Eropa.

4

SARAN

Kemhan berkoordinasi dengan Kemlu dhi perwakilan resmi RI di negara-negara Eropa untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan situasi keamanan Eropa pasca berakhirnya *Open Skies* serta kemungkinan pengaruhnya terhadap prioritas kerjasama pertahanan negara-negara Eropa dengan negara-negara di luar kawasan.

BIDANG ASIA PASIFIK

Kapal Pengawas Perikanan Vietnam Memasuki Wilayah Perairan Indonesia di Laut Natuna

1

FAKTA

Pada tanggal 17 Januari 2021, Bakamla (KN Tanjung Datu-301 dalam Sandi Operasi Trisula-I/21 dibantu dengan KRI Usman Harun) telah berhasil menghalau kapal pengawas perikanan Vietnam, Kiem Ngu 215 yang memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna sejak tanggal 16 Januari 2021. Alasan kapal Vietnam memasuki wilayah Indonesia karena adanya kerusakan mesin sejak tanggal 15 Januari 2021.



2

ANALISIS

Melihat posisi kapal Vietnam yang berada di wilayah perairan ZEEI menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan pelayaran, tetapi lego jangkar dengan tidak ada alasan yang jelas, seperti kerusakan mesin dan lainnya. Tetapi kapal-kapal tersebut hanya berada di sekitar perairan itu saja (tidak melaksanakan pelayaran terus menerus). Tidak menutup kemungkinan kapal-kapal tersebut sedang melakukan penelitian atau membangun konstruksi bangunan di atas karang untuk menandai bahwa daerah tersebut adalah bagian dari wilayahnya



INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

DAMPAK

Masuknya kapal Vietnam (yang bukannya pertama kali) merupakan bentuk ketidakpatuhan Vietnam terhadap hukum laut internasional. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Vietnam, melalui keberadaannya di wilayah sengketa secara terus menerus dalam upaya membendung pengakuan masyarakat internasional sebagai bagian dari wilayahnya.

4

SARAN

Kemhan melalui forum ADMM dan ADMM-Plus perlu menekankan Vietnam untuk mematuhi aturan internasional, termasuk juga menjaga sikap dan menghormati wilayah Indonesia.

INFO GLOBAL

JELANG PEMILU, PM ISRAEL MINTA PERLUAS PEMBANGUNAN PEMUKIMAN YAHUDI DI TEPI BARAT PALESTINA

1 FAKTA



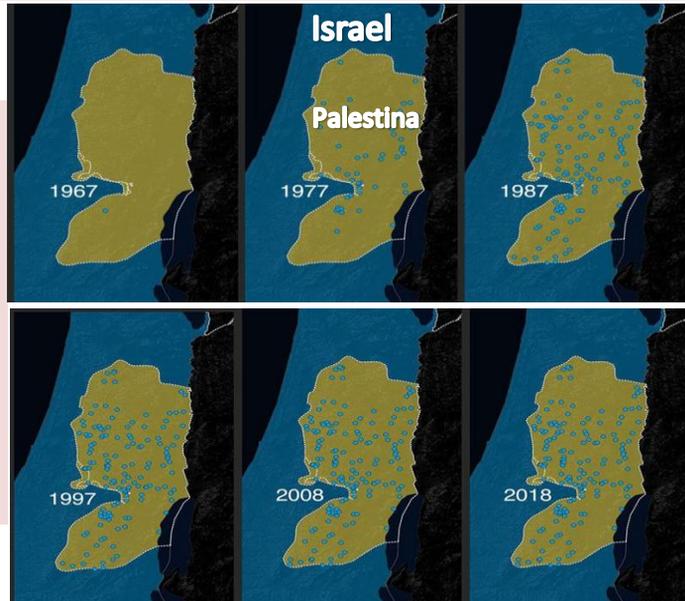
Pada Senin, 11 Januari 2020 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengarahkan pihak berwenang untuk menyetujui pembangunan 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat Palestina. Langkah itu juga dilakukan ketika perebutan politik internal meningkat menjelang pemilihan umum Israel, menyusul runtuhnya koalisi antara Perdana Menteri sayap kanan Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan berhaluan tengah Benny Gantz

2 ANALISIS

Pemilu di Israel akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 dan menurut analisis politik Israel, Netanyahu diperkirakan akan membuat serangkaian permainan untuk suara sayap kanan, termasuk dengan memperkuat kredibilitasnya sebelum pemungutan suara, dengan membuat kebijakan yang kontroversi. Kebijakan Perdana Menteri Israel tersebut didasarkan dari dukungan pemerintahan Donal Trump melalui deklarasi Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo bahwa Washington tidak lagi memandang permukiman Yahudi di tepi barat Palestina sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional.

3 DAMPAK

Kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengarahkan pihak berwenang untuk menyetujui pembangunan 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat Palestina akan mengundang reaksi keras dari negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi OKI serta dikecam oleh LSM anti Permukiman Israel Peace Now sebagai "Aib" yang ditujukan untuk memberi tahu pemerintahan Biden bahwa Israel sedang mencari Konfrontasi.



4 SARAN

Kemhan mendorong Kemlu untuk menggalang dukungan melalui upaya diplomasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi OKI dan PBB untuk mencegah rencana pembangunan perumahan Yahudi ditepi Barat Palestina yang merupakan wilayah yurisdiksi dan tempat tinggal warga Palestina.